

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang Proses *Collaborative Governance* dalam Menanggulangi Bencana Banjir di Kota Semarang dan Faktor Penghambat Pelaksanaan Proses *Collaborative Governance* dalam Menanggulangi Bencana Banjir di Kota Semarang dapat disimpulkan sebagai berikut.

##### **4.1.1 Proses *Collaborative Governance* dalam Menanggulangi Bencana Banjir di Kota Semarang**

Proses *Collaborative Governance* yang dilaksanakan dalam menanggulangi bencana banjir di Kota Semarang diterapkan melalui lima tahapan yakni *face to face dialogue*, *trust building*, *commitment to the process*, *shared understanding*, dan *intermediate outcomes*. Dalam pelaksanaan kolaborasi ini melibatkan beberapa instansi atau lembaga yang berkaitan dengan penanggulangan bencana banjir di Kota Semarang. Aktor utama dalam penanggulangan bencana banjir adalah BPBD Kota Semarang. Maka dari itu, BPBD Kota Semarang yang mengoordinir seluruh pihak yang ikut serta dalam kolaborasi penanggulangan bencana banjir di Kota Semarang. Berikut ini hasil dari proses *collaborative governance* yang dilaksanakan dalam menanggulangi bencana banjir di Kota Semarang.

**a. *Face to Face Dialogue***

Dalam pelaksanaan kolaborasi, setiap aktor kolaborasi telah membangun komunikasi dan koordinasi dengan seluruh pihak ikut serta dalam menanggulangi bencana banjir di Kota Semarang. Komunikasi itu sangat penting dalam pelaksanaan dialog tatap muka untuk menentukan kesepakatan bersama dalam mencapai tujuan bersama. Setiap aktor kolaborasi menyampaikan pendapat dan pandangan pada dialog tatap muka agar dapat memberikan keuntungan bagi seluruh pihak yang ikut serta dalam kolaborasi penanggulangan bencana banjir di Kota Semarang. BPBD Kota Semarang sebagai aktor utama telah mengadakan pertemuan dan diskusi dengan instansi-instansi lain ikut serta dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Semarang melalui FGD (*Forum Group Discussion*) Kota Tangguh, sehingga hal ini dapat membangun komunikasi dengan baik antar aktor kolaborasi. Tujuan dari pertemuan ini untuk meninjau kembali tupoksinya dari masing-masing pemangku kepentingan yang ikut serta dalam penanganan banjir.

**b. *Trust Building***

Membangun kepercayaan antar aktor kolaborasi dilakukan melalui koordinasi antar pemangku kepentingan untuk menjaga hubungan yang baik. Setiap aktor yang ikut serta dalam pelaksanaan kolaborasi penanggulangan bencana banjir di Kota Semarang wajib untuk membangun kepercayaan dan menjaga hubungan baik agar dapat menciptakan keberhasilan dalam berkolaborasi. Dalam kolaborasi,

*stakeholders* membangun kepercayaan dengan mengacu pada keuntungan atas kepentingan yang dimiliki oleh setiap aktor. Kepercayaan antar aktor kolaborasi yang dibangun untuk mencapai tujuan bersama adalah mewujudkan teratasinya bencana banjir di Kota Semarang dengan baik dan setiap aktor kolaborasi melakukan tanggung jawabnya sesuai dengan tupoksinya masing-masing yang telah disahkan. Maka dari itu, diperlukan peran pemimpin yang dapat menyadari pentingnya kolaborasi. Untuk membangun kepercayaan, BPBD Kota Semarang membentuk Katana (kelurahan tangguh bencana) yang diadakan maksimal delapan kali dalam setahun.

**c. *Commitment to the Process***

Komitmen yang dibangun dalam kolaborasi yaitu BPBD Kota Semarang mengadakan FGD/diskusi dengan mengundang instansi-instansi lain untuk menghasilkan rekomendasi atau tupoksi dari masing-masing pemangku kepentingan. Disisi lain, terdapat peraturan walikota yang berisi tentang instruksi kepada instansi-instansi yang terlibat sebagai bentuk tanggung jawab dalam menanggulangi bencana banjir di Kota Semarang. Dengan adanya instruksi tersebut, setiap aktor kolaborasi saling berkomitmen dan membantu dalam menangani banjir di Kota Semarang. Komitmen antar aktor kolaborasi juga telah disepakati bersama sesuai dengan rencana kontinjensi yang telah ditetapkan, sehingga para aktor perlu melaksanakan tupoksinya sesuai dengan kesepakatan bersama.

#### **d. *Shared Understanding***

Pemahaman bersama dalam kolaborasi dilakukan dengan melaksanakan sosialisasi yang dihadiri oleh aktor-aktor yang ikut serta dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Semarang. Dengan melaksanakan sosialisasi ini dapat memahami mengenai visi, misi, dan permasalahan serta memahami tupoksi masing-masing aktor kolaborasi. Dalam kolaborasi ini, para aktor saling berbagi pemahaman melalui rapat koordinasi untuk menciptakan kesepakatan bersama dalam mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, masalah banjir dapat diatasi dengan baik karena adanya tujuan bersama yang jelas sehingga dapat mencapai keberhasilan dalam kolaborasi.

#### **e. *Intermediate Outcomes***

Hasil sementara dalam kolaborasi ini yakni seluruh *stakeholders* telah menciptakan hubungan timbal balik dengan melakukan sikap saling membantu sama lain dalam menanggulangi bencana banjir di Kota Semarang. Selain itu, setiap aktor kolaborasi saling percaya dan berkoordinasi dengan baik dalam pelaksanaan kolaborasi. Dengan menerapkan hal tersebut dapat menciptakan hubungan yang baik dan memberikan dampak baik dalam jangka panjang. Seluruh *stakeholders* telah melaksanakan tupoksinya yang mengacu pada instruksi, jika terdapat kekurangan maka melakukan rapat evaluasi untuk mengatasi kekurangan yang terjadi. Namun, masih terdapat kendala seperti adanya sikap ego

sektoral dalam kolaborasi dimana beberapa aktor yang menganggap itu bukan tugasnya sehingga tidak bersedia melaksanakannya.

#### **4.1.2 Faktor Penghambat Pelaksanaan Proses *Collaborative Governance* dalam Menanggulangi Bencana Banjir di Kota Semarang**

Pelaksanaan proses *collaborative governance* dalam menanggulangi bencana banjir di Kota Semarang terdapat faktor penghambat yakni meliputi faktor budaya dan faktor institusi.

##### **a. Faktor Budaya**

Dalam pelaksanaan kolaborasi, hampir seluruh *stakeholders* menjalankan tugas pokok dan fungsinya mengacu pada prosedur yang berlaku dan tidak mampu mengambil risiko yang dapat membahayakan. Dengan adanya permasalahan kaku terhadap prosedur, maka tidak dapat mengambil keputusan atau tindakan di luar prosedur yang berlaku. Pelaksanaan penanggulangan banjir di Kota Semarang terdapat risiko yang dihadapi seperti waktu yang tidak dapat dijangkau kapan akan terjadinya banjir sehingga hal ini harus disetujui oleh pimpinan terlebih dahulu. Hal-hal yang seperti ini dapat menyebabkan terhambatnya kolaborasi dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Semarang.

##### **b. Faktor Institusi**

Dalam pelaksanaan kolaborasi penanggulangan bencana banjir di Kota Semarang hampir seluruh *stakeholders* tidak ada yang menerapkan struktur hierarkis, hanya satu saja yang menerapkan struktur tersebut. Sifat

spontanitas sudah dimiliki para aktor kolaborasi tetapi masih ada yang mengacu pada aturan yang ketat secara formal ataupun proses tradisional seperti SOP yang ditetapkan. Dengan adanya sikap kaku terhadap prosedur dapat menyebabkan kegagalan dalam pelaksanaan kolaborasi karena para aktor tidak dapat mengambil terobosan di luar SOP tersebut.

#### 4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti menyarankan beberapa hal tentang Proses *Collaborative Governance* dalam Menanggulangi Bencana Banjir di Kota Semarang, sebagai berikut:

1. Perlu adanya wadah komunikasi untuk bergerak satu pintu dalam pelaksanaan kolaborasi penanggulangan bencana banjir di Kota Semarang. Hal ini diperlukan agar setiap *stakeholders* terkait mudah dalam melakukan komunikasi dan koordinasi mengenai penanggulangan bencana banjir di Kota Semarang.
2. Dalam kolaborasi diperlukan inovasi yang diciptakan oleh seluruh pemangku kepentingan yang ikut serta dalam penanggulangan bencana banjir di Kota Semarang agar tidak terjadinya perbedaan kepentingan antar *stakeholders* terhadap pelaksanaan kolaborasi itu sendiri, karena dalam kolaborasi penanggulangan banjir ini setiap *stakeholders* memiliki inovasi yang berbeda-beda.
3. Seluruh *stakeholders* perlu menghadiri pertemuan dan diskusi yang diselenggarakan oleh BPBD Kota Semarang agar dapat menyamakan

keseepamahan mengenai visi, misi, dan pemecahan masalah dalam kolaborasi penanggulangan bencana banjir di Kota Semarang.

4. Dengan keterbatasan yang terkandung pada SOP tersebut, seharusnya *stakeholders* lebih berani dalam mengambil risiko pada saat keadaan darurat. Maka dari itu, seluruh *stakeholders* dalam menjalankan tugas perlu memiliki sifat spontan dengan tidak mengikuti aturan ketat secara formal.
5. Dalam menanggulangi bencana banjir di Kota Semarang, perlu diadakan sosialisasi kepada masyarakat secara rutin dengan jangka waktu 3 bulan sekali. Tujuannya agar seluruh masyarakat memahami tindakan yang akan dilakukan pada sebelum, saat, dan setelah banjir terjadi.